



GAPKI

Edisi 03, Maret 2024

NEWS



JANJI CALON PRESIDEN PADA SAWIT



Selamat Ulang Tahun GAPKI

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penerbitan buletin *GAPKI News* edisi Maret 2024 dapat kami wujudkan sesuai rencana. Apalagi waktu penerbitan ini berbarengan dengan kesibukan anggota GAPKI menyiapkan laporan tahunan perusahaan.

Kami Redaksi *GAPKI News* mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-43 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang jatuh pada 27 Februari 2024. Perjalanan panjang GAPKI telah menorehkan banyak tinta emas dalam pengembangan industri sawit. Semoga, GAPKI terus menebar manfaat terbaik untuk anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Apa yang telah dicapai GAPKI saat ini tentunya tidak lepas dari peran banyak pihak. Karena itu, mereka layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan pada hari bersejarah GAPKI ini. Semoga apresiasi itu dapat memotivasi generasi berikutnya untuk mengikuti jejak mereka memperjuangkan sawit sebagai komoditas andalan Indonesia.

Seiring dengan pesta demokrasi pemilihan presiden beberapa waktu lalu, kita perlu terus mencermati janji-janji para calon presiden dan wakil presiden. Terutama janji mereka untuk komoditas sawit. Kita patut bersyukur karena tiga pasangan capres dan cawapres sepakat bahwa komoditas sawit harus dikawal dan dikembangkan.

Karena itu, janji mereka perlu kita jadikan bagian dari penerbitan *GAPKI News* supaya kita mudah mengingat dan menagihnya kepada pemenang kontestasi pemilihan presiden dan wakilnya. Siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, patut kita berikan dukungan untuk kemaslahatan bersama, terutama kemaslahatan komoditas sawit.

Semoga penerbitan *GAPKI News* dapat memberikan energi tambahan untuk kita semua. Selamat menikmati dan membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT

GAPKI Pusat

PEMBINA

Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH

Mukti Sardjono

TIM AHLI

Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB

Fenny Sofyan

Dewan Redaksi

Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT

Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Syukuran Ulang Tahun GAPKI Ke-43.....	4
Polri Sepakati Bantuan Pengamanan Kebun Sawit.....	5

Komitmen Calon Pemimpin Indonesia Terhadap Sawit.....	6,7
Label Diprotes Korte Chocolate Ditarik Dari Pasar.....	8
Kbank Tawarkan Kerjasama Financing Anggota GAPKI.....	9
Memperkuat Kerjasama Dagang dengan Pakistan.....	10,11
GAPKI Diminta Aktif Dalam China-ASEAN Green Value Chain.....	12
Prospek Komoditas Sawit 2024.....	13



GAPKI Usulkan Perbaikan Uji Rendemen TBS..... 14



CPOPC Sinkronisasi Program Bersama GAPKI..... 15



GAPKI Usulkan Skema Bantuan Pupuk Perkebunan Sawit..... 16

Antisipasi Permintaan Migor Jelang Puasa dan Idul Fitri.....	17
BRIN Tawarkan Anggota GAPKI Terlibat Proyek Satreps.....	18
(Quote) Hilirisasi Komoditas Sawit.....	19
PPI Dunia Siap Promosikan Sawit di Berbagai Negara.....	20
Memperkuat Hubungan Industrial di Perkebunan Sawit.....	21
Sinkronasi Implementasi Peraturan FPKM 20 Persen.....	22
Optimalisasi Lahan kebun sawit untuk Padi Gogo.....	23
(Quote) Energi Hijau Terbarukan.....	24
Konversi Gas Metana Limbah Sawit Jadi Energi Terbarukan.....	25
GAPKI Riau Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir.....	26
Kolaborasi GAPKI dan DAD Berdayakan Masyarakat Dayak.....	27
Sosialisasi Hilirisasi Sawit untuk Jurnalis.....	28
(Quote) Dewan Sawit Indonesia.....	29
Komitmen GAPKI Dukung Kemajuan Pers Indonesia.....	30
GAPKI Adakan Studi banding ke PT Kayung Agro Lestari.....	31
Literasi Sawit Berkelanjutan untuk Generasi Milenial.....	32
Komitmen Industri Sawit Pada Kesetaraan Gender.....	33
Usulan GAPKI untuk Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan.....	34
GAPKI Lakukan Media Visit ke TEMPO.....	35

SYUKURAN ULANG TAHUN GAPKI KE-43



Kebun sawit yang sudah memiliki perizinan dan alas hak, baik itu SHM atau HGU semestinya bukan kawasan hutan lagi.

Bulan Februari selalu menjadi momentum istimewa bagi GAPKI. Apalagi ketika tanggal di kalender menyentuh angka 27. Itulah hari ulang tahun GAPKI yang pada tahun 2024 ini diperingati sebagai Ulang Tahun GAPKI ke-43. Asosiasi para pengusaha kelapa sawit ini didirikan di Medan, 27 Februari 1981. Syukuran Ulang Tahun GAPKI ke-43 diadakan di The Ayana Midplaza, Jakarta pada 27 Februari 2024.

Ketua Dewan Pembina GAPKI Joe fly J. Bahroeny mengatakan kontribusi GAPKI terhadap industri sawit di Indonesia sangat signifikan. Perannya dalam mengembangkan industri ini tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman dan kekompakan adalah kunci untuk menyelesaikan setiap masalah. "GAPKI akan terus berkiprah untuk kemajuan industri sawit di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan tantangan industri sawit tahun ini di tengah ketidakpastian global. Amerika mengalami inflasi di atas



target. Adapun China bergelut dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19. "Begitu juga dengan Eropa yang mengalami defisit fiskal dan inflasi yang tinggi," katanya. Akibatnya ekspor CPO dan PKO di tahun 2022 turun 2,38 persen dari 33,15 juta ton menjadi 32,21 juta ton.

Terkait dengan indikasi kawasan hutan masuk kebun sawit, GAPKI mengusulkan solusi yang terbaik. Bagi GAPKI, kebun sawit yang sudah memiliki perizinan dan alas hak, baik itu SHM atau HGU semestinya bukan kawasan hutan lagi. Karena itu, penyelesaian jangan sampai menyebabkan pengurangan areal yang signifikan yang akan berdampak pada pengurangan produksi sawit.

GAPKI juga meminta kejelasan regulasi tentang kewajiban Fasilitas

Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20 persen. Kejelasan dasar peraturan yang digunakan melaksanakan ketentuan FPKM ini perlu disosialisasikan tidak hanya kepada dunia usaha, namun juga kementerian / lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. "Tumpang tindih perlu segera diselesaikan," katanya.

Pada Syukuran Ulang Tahun GAPKI ke-43 ini, GAPKI juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang memiliki kontribusi penting pada industri sawit.

Beberapa tokoh itu antara lain Ahmad Mangga Barani, Joe fly J. Bahroeny, Derom Bangun, Daud Dharsono, Joko Supriyono, Eddy Abdurrachman, Musdhalifah Machmud, dan Rahmat Syah. ■

POLRI SEPAKATI BANTUAN PENGAMANAN KEBUN SAWIT

“Gangguan seperti pencurian dan penjarahan jadi hambatan signifikan dalam menjaga kelangsungan industri kelapa sawit.”

Pencegahan masalah sosial dan keamanan di sekitar perkebunan sawit menjadi salah satu faktor penting peningkatan kinerja dan produktivitas kebun. Potensi munculnya masalah di sekitar kebun harus diantisipasi sedini mungkin. Karena itu, GAPKI perlu menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki kewenangan secara hukum seperti kepolisian.

GAPKI dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman Peningkatan Bantuan Pengamanan, Pencegahan, Penanganan Konflik Sosial Serta Penegakan Hukum di Lingkungan Kerja Anggota GAPKI.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Verdianto I. Bitticaca di Jakarta, 27 Februari 2024. Ada tujuh poin yang dikerjasamakan yakni pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, pencegahan dan penanganan konflik, penegakan hukum, upaya pencegahan kebakaran lahan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

“Gangguan seperti pencurian dan penjarahan di kebun sawit jadi hambatan yang signifikan dalam menjaga kelangsungan industri kelapa sawit,” kata Brigjen Endi Sutendi, Kepala Biro Pengendalian Operasi (Karodalops) Sops Mabes Polri yang mewakili Irjen Verdianto I. Bitticaca. Terganggunya operasional kebun sawit dikhawatirkan berdampak ke aspek yang lebih luas karena kontribusi sawit terhadap ekonomi negara sangat besar.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan pada dasarnya pelaku usaha, khususnya anggota GAPKI dalam menjalankan bisnisnya taat mengikuti peraturan perundangan



yang ada. Apalagi investasi kelapa sawit adalah investasi jangka panjang, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.

“Untuk itu, kami menyambut baik Nota Kesepahaman ini, yang nanti dapat disosialisasikan ke masing-masing daerah. Nota Kesepahaman ini perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih operasional. Kepada para Ketua GAPKI Cabang,

Nota Kesepahaman ini nantinya dapat ditindaklanjuti dengan jajaran kepolisian daerah dan kepolisian resor setempat,” katanya.

Dengan adanya nota kesepahaman antara GAPKI dan Polri diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan keamanan berusaha dalam industri kelapa sawit Indonesia serta mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif. ■



JANJI CALON PRESIDEN TERHADAP SAWIT

Badan khusus sawit dibutuhkan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kebijakan seperti sekarang.

Pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 sudah dituntaskan pada 14 Februari 2024. Pesta demokrasi yang berlangsung aman ini patut disyukuri karena akan berdampak terhadap investasi, termasuk investasi di sektor kelapa sawit. Sebagaimana kita ketahui, hasil sementara pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden sudah kita ketahui bersama sembari menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, sebelum hari pemilihan tiba, tiga kandidat presiden dan wakil presiden diberikan kesempatan untuk berkampanye menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing sejak 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Dalam lima kali debat kandidat ditambah dengan berbagai

Sawit adalah *corporate advantages* yang paling mudah, yang paling sudah eksis di Indonesia dan ini harus menjadi strategis pertahanan kita.

diskusi publik, kita dapat melihat bagaimana persepsi dan rencana setiap kandidat terhadap komoditas sawit. Satu hal yang melegakan pelaku industri sawit adalah tiga pasangan kandidat pemimpin Indonesia ini sepakat tentang peran penting sawit.

Visi tiga kandidat capres dan

cawapres dapat dilihat dari *Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional* yang diselenggarakan oleh Harian Kompas di Jakarta pada 17 Januari 2024. Tidak ada yang membantah bagaimana vitalnya komoditas sawit bagi perekonomian negara sehingga industri ini harus dijaga keberlangsungannya. Perbaikan dan penyempurnaan dari sisi regulasi, tata kelola, hingga implementasi lapangan tetap perlu dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional.

Achmad Nur Hidayat yang mewakili Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) mengatakan pasangan nomor urut 01 punya perhatian serius bagaimana menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. "Kami ingin katakan pada bangsa Indonesia dan dunia bahwa sawit adalah *corporate advantages* yang paling mudah, yang paling sudah eksis di



Indonesia dan ini harus menjadi strategis pertahanan kita,” katanya.

Komoditas sawit, kata dia, adalah komoditas yang melonjak dahsyat sejak 1998. Karena itu, dibutuhkan upaya hilirisasi atau industrialisasi produk sawit dan produk turunannya secara berkelanjutan. Namun, Achmad menyoroti langkah kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor minyak sawit yang berdampak serius terhadap pelaku industri dan petani. Selain itu, pihaknya ingin memperjelas regulasi kawasan hutan untuk kejelasan lahan sawit.

Adapun Panji Irawan yang mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengatakan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia harus dipertahankan sebagai bagian dari dukungan visi Indonesia Emas 2045. Kelapa sawit adalah bonus sumber daya alam yang harus dioptimalkan sebagaimana bonus demografi. “Komoditas sawit merupakan tulang punggung program

BPDPKS perlu diperkuat sehingga kewenangannya lebih besar daripada sekadar juru bayar dan juru tagih.

pasangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Menurut Panji Irawan, Indonesia berpotensi menjadi raja energi hijau dunia melalui produk turunan biofuel dari sawit. Karena itu, legalitas kebun sawit di kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani menjadi prioritas program. Sudah saatnya petani didorong masuk ke sisi hilir melalui koperasi. Pasangan Prabowo-Gibran berpendapat perlunya pendirian

badan sawit Indonesia mengingat besarnya kontribusi dan peran sawit untuk perekonomian nasional.

Peran signifikan sawit juga ditegaskan oleh Danang Girindrawardana yang mewakili Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Bahkan, sawit menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi 7% dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. Karena itu, masalah sawit di sektor hulu, tengah, dan hilir harus diselesaikan. “Solusinya 3S, Solusi-Strategi-Sawit. Undang para pemangku kepentingan untuk merumuskan *roadmap* ke sana,” katanya.

Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah egosektoral yang berdampak langsung pada kepastian hukum lahan seperti Hak Guna Usaha (HGU). Karena itu, diperlukan badan atau lembaga khusus setingkat menteri yang menangani komoditas sawit. Keberadaan BPDPKS saat ini perlu diperkuat sehingga kewenangannya lebih besar daripada sekadar juru bayar dan juru tagih. “Kita perlu ubah budaya birokrasi dalam menyusun regulasi,” katanya.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, semua kandidat pemimpin nasional ini sepakat sawit penting bagi Indonesia. Ekspor CPO pada 2022 saja mencapai USD 39,07 miliar (setara Rp 600 triliun). Mereka juga sepakat pentingnya pembentukan badan atau lembaga khusus yang menaungi para pemangku kepentingan sawit. *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) bisa dijadikan contoh. “MPOB sukses membuat semua urusan sawit tertata dengan baik dan tidak ada lagi kesemawutan kebijakan,” katanya.

Badan khusus dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan seperti saat ini. Salah satu contohnya untuk fasilitasi perkebunan masyarakat 20%, tiga kementerian punya aturan yang berbeda-beda. Padahal, komoditas sawit sedang menghadapi tantangan besar yakni kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR). “Yang jelas tata kelola sawit harus lebih baik. Sehingga pelaku usaha bisa nyaman dalam menjalankan usahanya,” harap Eddy Martono kepada siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia nanti. ■



LABEL DIPROTES, KORTÉ CHOCOLATE DITARIK DARI PASAR



Yang paling dikhawatirkan dari label bebas minyak sawit ini bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan komoditas sawit nasional.

Label *palm oil free* pada kemasan coklat produksi Korté Chocolate memicu reaksi keras dari petani hingga pebisnis sawit. Apalagi produk olahan ini buatan dalam negeri, bukan produk asing. Produk Korté Chocolate Cashew & Seasalt diproduksi oleh CV Korte Mitra Kreasi, Surabaya dengan nomor PIRT 5093578035150-26.

Menyikapi temuan label bebas minyak sawit ini, Kementerian Perdagangan bersikap tegas. Menggelar rapat bersama GAPKI, APKASINDO, BPOM, AIMMI, dan tiga asosiasi produsen coklat di Ruang Cendana Gedung II Kemendag pada 10 Januari 2024. Dalam rapat ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Kampanye Positif Agam Fatchurrochman dan Ketua Komp. Litigasi Luar Negeri Norman Fajar Wibowo.

GAPKI meminta pemerintah bersikap tegas karena kejadian ini bukan yang pertama. Apalagi pedoman label pada produk olahan sudah ada ketentuannya seperti Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Pedoman tentang label sudah dibukukan dan disosialisasikan bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2019. Karena itu, program kampanye label pangan yang digagas sejak empat tahun lalu itu ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Label pada produk Korté Chocolate ini juga memicu reaksi keras APKASINDO yang meminta pemerintah mencabut izin usaha produsen coklat tersebut. Label ini dinilai menyakiti petani sawit dan mereka yang berjuang meredam kampanye negatif sawit. Desakan

pencabutan izin dan penarikan produk disuarakan AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia). Asosiasi balik mempertanyakan produk Korte karena tidak lumer pada suhu ruangan.

Terkait desakan ini, Direktorat Tata Niaga Kemendag meminta Balai Tata Niaga Kemendag Jawa Timur mendatangi produsen coklat ini. Produsen coklat ini juga sudah mendatangi Kemendag Jatim untuk klarifikasi. Hasilnya, mereka bersedia menarik produknya dari pasar dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulang kembali. Penarikan produk dari pasar langsung dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan pemerintah.

Peristiwa ini diharapkan menjadi yang terakhir karena sudah pernah terjadi beberapa kali dalam lima tahun belakangan. Yang paling dikhawatirkan dari label bebas minyak sawit ini bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan komoditas sawit nasional. Tidak menutup kemungkinan label ini justru jadi kampanye negatif pihak asing untuk mempersoalkan komoditas sawit Indonesia. ■



KBANK TAWARKAN KERJASAMA FINANCING ANGGOTA GAPKI

Salah satu peluang yang disampaikan antara lain ada kebutuhan CPO Myanmar sekitar 25.000-30.000 MT per bulan.

Ledakan industri makanan cepat saji (*fast food*) di Myanmar sejak 2018 yang terus bergulir mendorong permintaan terhadap minyak kelapa sawit meningkat tajam. Minyak sawit dinilai paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap minyak nabati Myanmar sehingga impor CPO dari Indonesia terus meningkat. Bahkan, 99% kebutuhan minyak sawit Myanmar dipenuhi dari impor minyak sawit Indonesia. Dampaknya terhadap industri yang lain di Myanmar cukup positif dan mendorong pertumbuhan investasi.

Kondisi ini dipandang sebagai peluang positif oleh Kasikornbank (KBank), salah satu bank swasta terbesar di Thailand yang sudah memiliki kerjasama kuat dengan Myanmar melalui *Thai Business Association of Myanmar* (TBAM). Dua institusi bisnis tertarik menjalin relasi usaha yang lebih solid dengan pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Karena itu, perwakilan KBank dan TBAM berkunjung ke kantor GAPKI di Jakarta pada 17 Januari 2024.

Dalam pertemuan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan dan Ketua Komp. Hubungan KBRI Seruni Rhea Sianipar.



Kbank membuka peluang kerjasama pembiayaan (*financing*) bagi anggota GAPKI yang ingin melakukan kegiatan ekspor produk minyak sawit ke Thailand, Myanmar, dan negara lain di Asia Tenggara. KBank berfokus untuk pembiayaan ekspor produk CPO anggota GAPKI ke negara-negara ASEAN.

Kbank menjelaskan bahwa saat ini sudah ada perusahaan di Myanmar yang mengimpor 5.000 MT minyak sawit dari Indonesia. Perusahaan lain berencana mencari pasar potensial di Indonesia. Salah satu peluang yang disampaikan antara lain ada kebutuhan CPO Myanmar sekitar 25.000-30.000 MT per bulan. Berdasarkan data Departemen Pertanian AS, impor CPO dalam enam tahun terakhir naik lebih dari 50% menjadi 750.000 ton. Peluang bisnis ini tentu saja menarik bagi KBank dan kabar positif bagi anggota GAPKI.

KBank berfokus untuk pembiayaan ekspor produk CPO anggota GAPKI ke negara-negara ASEAN.

Dalam beberapa tahun terakhir, KBank terus berekspansi di Indonesia setelah mengakuisisi PT Bank Maspion Indonesia, Tbk pada akhir 2022. Sebanyak 67,5% saham Bank Maspion diakuisisi oleh KBank sehingga total memiliki 80% saham bank ini. KBank menempatkan Bank Maspion di bawah Kasikorn Vision Financial Company Pte Ltd yang dibentuk di Singapura. ■



MEMPERKUAT KERJASAMA DAGANG DENGAN PAKISTAN

Forum ini juga untuk mengembangkan jaringan pengusaha sawit Indonesia dalam rangka memperluas pasar di Pakistan.

Sebagai salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia, Pakistan dan Indonesia berusaha untuk saling mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan komoditas sawit. Salah satu bentuk dukungan itu antara lain berpartisipasi dalam *Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2024* di Karachi, 12-13 Januari 2024. Konferensi tahunan ini strategis bagi GAPKI sebagai asosiasi para pengusaha sawit di Indonesia. Karena itu, GAPKI berkomitmen mendukung penuh PEOC sejak 2017 hingga sekarang.

Dalam konferensi ini, GAPKI hadir sebagai delegasi Indonesia bersama Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk mengoptimalkan promosi sawit di Negeri Seribu Cahaya ini. Di sisi lain, GAPKI juga perlu mendapatkan gambaran yang semakin lengkap

tentang Pakistan dari Konsulat Jenderal RI di Karachi.

Saat *courtesy visit* ke KJRI Karachi, delegasi Indonesia mendapatkan penjelasan harapan Pakistan agar hubungan dengan Indonesia semakin kuat seperti hubungan Indoensia-India. Harapan ini dinilai wajar karena Pakistan termasuk lima negara importir terbesar komoditas sawit Indonesia. Karena itu, Konjen RI di Karachi akan memberikan informasi berkelanjutan tentang Pakistan kepada pihak terkait di Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan kerjasama lainnya.

Selain berdialog dengan Konjen RI di Karachi, GAPKI juga menghadiri berbagai pertemuan bisnis dengan pengusaha Pakistan, mitra bisnis, hingga kuliah umum oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan untuk civitas akademika *Institute of Business Administration (IBA)* Karachi. Forum ini juga untuk mengembangkan jaringan pengusaha

sawit Indonesia untuk memperluas pasar di Pakistan. “Kami yakin pasar Pakistan akan terus berkembang ke depan,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

Dalam pelaksanaan *Pakistan Edible Oil Conference 2024*, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam sambutannya menyampaikan serapan CPO Indonesia di Pakistan yang cukup besar. Hingga Oktober 2023, ekspor CPO Indonesia ke Pakistan 2,24 juta ton senilai US\$ 2,1 miliar. Sedangkan 2022, ekspor CPO ke Pakistan 2,78 juta ton senilai US\$ 3,1 miliar. Kebutuhan CPO Pakistan per tahun 4,5 juta ton. Padahal kemampuan produksinya baru 0,75 juta ton.

Ketum GAPKI juga memaparkan aspek produksi, konsumsi, dan ekspor industri sawit di Indonesia. Peningkatan produksi tahun ini diperkirakan maksimal 5%. “Kalau mandatori B35 diperpanjang, kebutuhan domestik Indonesia mencapai 25 juta ton,” katanya. Maka, ekspor CPO diprediksi berkurang



4,13% atau hanya 29 juta ton. Pertumbuhan produksi tahun ini yang rendah akan berdampak terhadap pasokan di pasar global.

Berdasarkan data GAPKI, penggunaan minyak sawit Indonesia pada Januari-Oktober 2023 mencapai 19,03 juta ton. Dari jumlah tersebut, 8,46 juta ton untuk kebutuhan biodiesel dan 8,6 juta ton selisihnya digunakan untuk makanan. Selain itu, konsumsi minyak sawit dalam negeri juga meningkat untuk produk oleochemical.

Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan yang dipercaya sebagai salah satu pemateri konferensi menjelaskan penurunan ekspor sebenarnya sudah terjadi sejak 2020 dengan tujuan ekspor utama yakni China, India, Uni Eropa, Pakistan dan Amerika Serikat. Pemicu lain yang menyebabkan penurunan adalah produksi sawit yang menurun sejak 2005. Periode 2005-2010 penurunan produksi mencapai 10%. Periode 2010-2015 turun 7,4%, dan periode 2015-2020 turun 3,2%. "Seterusnya stagnan," katanya.

Partisipasi GAPKI di *Pakistan Edible Oil Conference 2024* diapresiasi oleh Konsul Jenderal RI Karachi Dr. June Kuncoro Hadiningrat. "Kerjasama perdagangan ini memberikan keuntungan bagi kedua negara," katanya. Pakistan dengan 235 juta penduduk adalah pasar potensial untuk minyak sawit dan produk turunannya. ■

AGENDA DELEGASI INDONESIA DI PAKISTAN

11 JANUARI 2023

- GAPKI dan pejabat Kemenko Perekonomian mengadakan *courtesy visit* ke Konjen RI di Karachi. GAPKI berkomitmen mendukung PEOC 2024 seperti dilakukan sejak 2017.
- GAPKI dan Konjen RI mengadakan *Networking Dinner* di Hotel Movenpick, Karachi yang dihadiri oleh 35 orang dari berbagai kalangan di Pakistan.

12 JANUARI 2023

- GAPKI dan delegasi Indonesia mengadakan *Breakfast Meeting* bersama Konjen RI di Karachi yang juga diikuti pemenang *#YoungElais Ambassador* dari Pakistan yang diadakan oleh CPOPC tahun 2023.
- *Networking Lunch* bersama Golden Agri Resources (GAR) Pakistan di Sindh Club bersama mitra bisnis GAR untuk memperkuat kerjasama usaha.
- GAPKI memberikan kuliah umum tentang industri sawit Indonesia di *Institute of Business Administration (IBA)* Karachi yang dihadiri civitas akademika IBA.
- GAPKI menghadiri undangan *Pre-Conference Dinner* bersama peserta konferensi dari berbagai negara.

13 JANUARI 2023

- Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan sambutan dalam *Pakistan Edible Oil Conference 2024*.
- Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan menjadi pemateri konferensi yang membahas trend produksi dalam tiga tahun terakhir.

GAPKI DIMINTA AKTIF DALAM CHINA-ASEAN GREEN VALUE CHAIN



Pemerintah China berkepentingan supaya Indonesia, terutama GAPKI berpartisipasi karena posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.



Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China mengajak GAPKI berpartisipasi dalam program China-ASEAN Green Value Chain. Undangan ini disampaikan dalam pertemuan mereka dengan GAPKI yang diwakili oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, Ketua Bidang Kampanye Positif Agam Fatchurrochman dan Ketua Kompartemen Hubungan Stakeholders Edi Suhardi di Kantor GAPKI di Jakarta pada 16 Januari 2024. Selain GAPKI, pemerintah Indonesia juga diundang bergabung dalam forum ini.

China-ASEAN Green Value Chain adalah forum kemitraan yang diinisiasi pemerintah China dan diorganisir oleh The China-ASEAN Environmental Cooperation Center (CAEC). Thailand dan Vietnam sudah bergabung di forum yang berfokus

pada isu perubahan iklim, riset bibit tahan iklim, limbah, pengurangan emisi, banjir, kekeringan, dan lainnya. Namun, forum ini membahas tentang NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*).

China berkepentingan agar Indonesia, terutama GAPKI, berpartisipasi karena posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Di sisi lain, China adalah salah satu negara importir terbesar produk CPO dari Indonesia. Pada 2022, ekspor CPO Indonesia ke China 6,35 juta ton.

Volume ekspor ini diprediksi meningkat ke depan. Partisipasi ini diharapkan meningkatkan aspek *sustainability* dan *traceability* yang diminta Uni Eropa dan Amerika.

Dalam diskusi dengan GAPKI beberapa tema kerjasama diusulkan seperti *policy dialogue*, *capacity building*, *joint research*, dan

demonstrations.

Topik yang diusulkan GAPKI antara lain terkait *weather forecasting*, bibit tahan kekeringan, kesehatan tanaman, dan lain-lain. Bibit tahan kekeringan diusulkan karena tanaman sawit di China ditanam di lahan marginal. Namun, tema ini belum ditentukan dan akan ditindaklanjuti kemudian.

Selain ke GAPKI, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China juga mengunjungi kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada 16 Januari 2024 yang diterima oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud.

Selama berada di Indonesia, mereka didampingi oleh WWF yang bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan turut menjaga pasar sawit Indonesia di China. ■



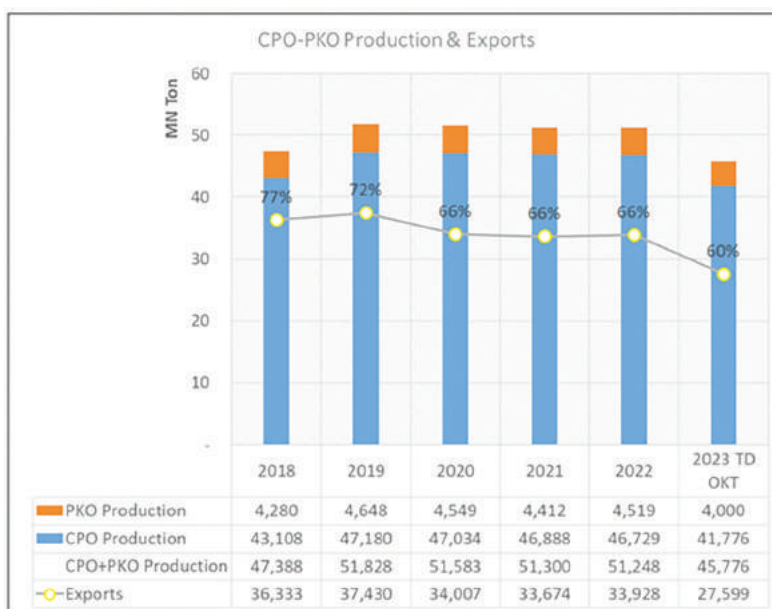
PROSPEK KOMODITAS SAWIT 2024

Permintaan dalam negeri naik terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia dan biodiesel.

Ketidakpastian kondisi yang membayangi ekonomi global, terutama di negara-negara maju diprediksi memberikan dampak terhadap komoditas minyak nabati, termasuk minyak sawit di dalamnya. Apalagi eskalasi geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah masih memanaskan akan berpengaruh besar terhadap pasokan komoditas. Dengan melihat fakta-fakta seperti ini, GAPKI memperkirakan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit pada 2024 ini tidak banyak berbeda dibandingkan tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam pemaparan Kinerja Industri Sawit 2023 dan Prospek Sawit 2024 dalam *Syukuran Ulang Tahun GAPKI ke-43 dan Konferensi Pers* di Jakarta pada 27 Februari 2024.

Selain harga, produksi CPO juga diprediksi stagnan. Namun, di sisi lain permintaan dalam negeri justru naik terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia dan biodiesel karena program B35 akan diterapkan secara penuh. Peningkatan kebutuhan dalam negeri ini membuat ekspor diprediksi menurun.



Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, GAPKI mendorong penyelesaian masalah kebun sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Begitu juga kebun sawit yang memiliki perizinan dan hak alas, baik SHM atau HGU seharusnya bukan kawasan hutan.

"Selain itu, program PSR harus berjalan sesuai target 180 ribu/ha per tahun," katanya. Ke depan, GAPKI mengusulkan kebun sawit untuk energi agar kebutuhan CPO untuk energi tidak mengganggu kebutuhan untuk pangan, industri dalam negeri dan ekspor.

Pada konferensi pers ini GAPKI memaparkan produksi CPO 2023 diperkirakan mencapai 50,07 juta ton atau naik 7,15% dibandingkan 2022. Sedangkan produksi PKO mencapai

4,77 juta ton atau naik 5,66% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi disebabkan antara lain harga minyak sawit menjelang akhir 2021 dan sepanjang 2022 relatif tinggi yang mendorong pelaku usaha mengelola kebun dengan baik, termasuk pemberian pupuk.

Faktor lain yang mendorong produksi naik adalah perluasan areal yang telah menghasilkan pada 2023. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2017-2020 ada perluasan areal hingga 540 ribu hektar dan pada 2023 ada penambahan areal tanaman menghasilkan seluas 260 ribu hektar. Adapun El Nino yang semula diprediksi melanda Indonesia, ternyata tidak berpengaruh pada produksi tanaman sawit. ■



GAPKI USULKAN PERBAIKAN UJI RENDEMEN TBS

Pengambilan sampel oleh PPKS sebaiknya tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu terutama musim yang bagus.

Dalam tata niaga sawit di Indonesia, persentase rendemen *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) merupakan acuan penetapan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani yang diserap oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Rendemen diuji secara berkala sesuai dengan Permentan No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun. Hasil uji disepakati sebagai dasar penetapan harga TBS.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan uji rendemen TBS karena pengujian dan penetapan rendemen terakhir dilakukan pada 2010. Uji rendemen TBS dilakukan kembali pada 2021 atau setelah 10 tahun tidak dilakukan. Padahal, berdasarkan Permentan No. 01 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 1 disebutkan evaluasi rendemen CPO dan PK harus dilakukan secara periodik paling kurang sebanyak satu kali dalam lima tahun.

Untuk menyepakati hasil pengujian rendemen CPO pekebun di Sumatera Selatan, GAPKI yang diwakili oleh Kompartemen. Kebijakan & Sosialisasi PSR Muhammad Iqbal menghadiri Rapat Pembahasan Hasil Rendemen CPO Sumatera Selatan.

Rapat pada 9 Januari 2024 di Kantor Disbun Provinsi Sumatera Selatan ini dihadiri juga oleh Direktur PPHP Kementan Prayudi Syamsuri, GAPKI Cabang Sumatera Selatan, Apkasindo, Aspekpir, Tim Kerja Penetapan Harga TBS Sumsel, Perwakilan KUD, dan 12 pabrik kelapa sawit (PKS).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Analisis TBS yang diadakan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan pada 20 Desember 2023 tentang uji rendemen CPO di Sumatera Selatan. Kesepakatan yang diusulkan antara lain rendemen CPO dan PK umur tanam 3 dan 4 tahun untuk Sumsel kembali ke hasil uji tahun 2018. Rendemen CPO dan PK umur tanam 24 dan 25

tahun memakai hasil uji PPKS tahun 2022. Dua usulan ini disampaikan kepada Disbun Provinsi Sumsel untuk ditindaklanjuti bersama tim penetapan harga TBS.

Berdasarkan kesepakatan rapat di Medan inilah Disbun Provinsi Sumsel mengadakan rapat pembahasan pada 9 Januari 2024.

Kesepakatan yang dicapai antara lain umur tanaman 3 tahun, rendemen CPO 19,26 dan PK 3,90. Umur tanaman 4 tahun, rendemen CPO 19,83 dan PK 4,06. Umur tanaman 24 tahun, rendemen CPO 20,73 dan PK 6,04. Umur tanaman 25 tahun, rendemen CPO 20,64 dan PK 6,25.

Dalam rapat ini GAPKI menyampaikan perlunya perbaikan uji rendemen. Pengambilan sampel oleh PPKS sebaiknya tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu terutama musim yang bagus. Sebab, hasil uji rendemen dikhawatirkan tidak dapat mewakili persentase rendemen aktual secara keseluruhan. ■

CPOPC SINKRONISASI PROGRAM BERSAMA GAPKI

Sinkronisasi program diharapkan dapat memberikan nilai lebih dalam program CPOPC dan tidak terjadi tumpang tindih program.

Indonesia dan negara-negara produsen minyak sawit seperti Malaysia terus mencari jalan keluar terbaik dalam menghadapi implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) yang dilakukan Uni Eropa.

Melalui CPOPC, organisasi antar pemerintah negara penghasil minyak sawit, langkah strategis dan taktis dijalankan. Salah satunya sinkronisasi program-program CPOPC dengan asosiasi pengusaha kelapa sawit seperti GAPKI.

Untuk sinkronisasi program, CPOPC diwakili oleh Sekjen CPOPC Rizal Affandi Lukman, Deputi Sekjen Datuk Nageeb Wahab, dan dua Direktur CPOPC yakni Witjaksana Darmosarkono dan Puah Chiew Wei mengunjungi kantor GAPKI di Jakarta, 22 Januari 2024.

Mereka diterima oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, Wakil Sekjen Lolita Bangun, Ketua Komp. Hubungan KBRI Seruni Rhea Sianipar, dan Ketua Komp. Hubungan Lembaga Negara Tofan Mahdi.

Dalam pertemuan ini CPOPC menjelaskan bahwa program yang dijalankan merupakan hasil sinkronisasi program pemerintah Indonesia dan Malaysia. CPOPC melakukan pendampingan dan jembatan sehingga program masing-masing negara dapat disinkronkan.



Meski demikian peran dari dunia usaha tetap dibutuhkan untuk memperkuat program ini, terutama yang berhubungan dengan kampanye positif sawit.

Selain program pemerintah, CPOPC ingin melakukan sinkronisasi dengan program GAPKI sebagai asosiasi pengusaha kelapa sawit. Sinkronisasi program dengan kalangan dunia usaha diharapkan dapat memberikan nilai lebih dalam program CPOPC dan tidak terjadi tumpang tindih program.

Beberapa program yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit antara lain promosi dan kampanye positif sawit, komunikasi dan lain-lain.

Program CPOPC lain yang

akan disinkronkan mencakup konferensi dan forum multilateral seperti *Sustainable Vegetable Oil Conference (SVOC)*. Sedangkan forum multilateral dapat melibatkan organisasi internasional antara lain *United Nations (UN)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, dan forum internasional lainnya.

Terkait langkah CPOPC terkini, perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa melakukan pertemuan dengan Gugus Tugas Ad Hoc EUDR untuk fokus membahas lima hal utama yang akan diperjuangkan pemerintah terkait kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa yang disahkan pada Mei 2023 dan akan berlaku efektif pada akhir 2024. ■

GAPKI USULKAN SKEMA BANTUAN PUPUK PEKEBUN SAWIT

Bantuan untuk pekebun sawit sumber pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).



Sejak kelapa sawit tidak dimasukkan dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi pada pertengahan 2022, secara otomatis pekebun sawit tidak boleh membeli pupuk subsidi di kios resmi. Larangan ini tentu memberatkan petani dan pekebun sawit karena biaya produksi jadi meningkat. Sementara, harga TBS berfluktuasi yang membuat beban petani sawit, terutama petani mandiri atau swadaya semakin berat.

Untuk membantu meringankan beban petani dan pekebun, GAPKI memberikan masukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Percepatan Penyaluran Dukungan Sarana Prasarana bagi Perkebunan Sawit Rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Hotel Borobudur, Jakarta pada 2 Februari 2024. Dalam FGD ini GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat.

FGD ini berfokus pada dua tema yakni identifikasi bantuan pupuk bagi pekebun sawit dan usulan rekomendasi mekanisme penyaluran bantuan pupuk untuk pekebun sawit. Dalam pembahasan ini, GAPKI

FGD ini berfokus pada dua tema yakni identifikasi bantuan pupuk bagi pekebun sawit dan usulan rekomendasi mekanisme penyaluran bantuan pupuk untuk pekebun sawit.

mengusulkan agar ada regulasi terkait bantuan subsidi khusus untuk pekebun sawit. Pemberian bantuan diusulkan menggunakan skema seperti bantuan pupuk bersubsidi untuk petani padi, jagung, dan kedelai (pajale) yang sudah berjalan di Kementan.

Yang membedakan bantuan untuk pekebun sawit adalah sumber pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Untuk melaksanakan skema bantuan ini bisa melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN untuk menugaskan Pupuk Indonesia

Holding Company (PT Pupuk Indonesia) menjalankan Public Service Obligation (PSO) bantuan pupuk kepada pekebun sawit.

Selain itu, GAPKI juga mengusulkan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara BPDPKS dan PT Pupuk Indonesia tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk bagi Pekebun Sawit. Mekanisme penyaluran bantuan pupuk berdasarkan CP/CL yang ditandatangani oleh Bupati/Kadisbun Kabupaten dengan memperhatikan 5 Tepat yakni Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran, Tepat Guna, dan Tepat Harga.

Usulan GAPKI dinilai positif oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Ismarini menyatakan akan melaporkan usulan GAPKI kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian untuk pembahasan lebih lanjut. Rencananya Kemenko Perekonomian akan mengundang GAPKI dan asosiasi pekebun sawit untuk membahas usulan bantuan pupuk ini.

ANTISIPASI PERMINTAAN MIGOR JELANG PUASA DAN IDUL FITRI

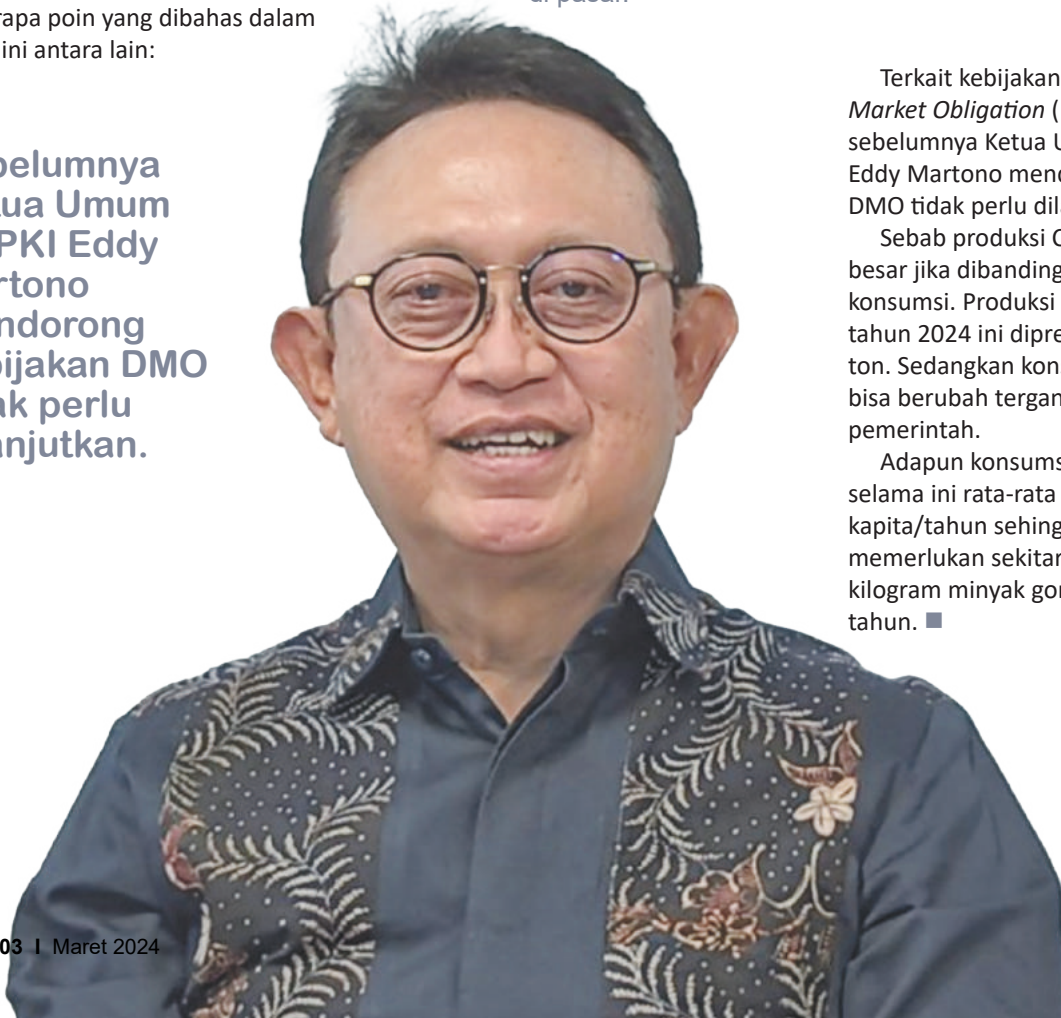
HET minyak goreng tetap Rp 14.000/liter sehingga diharapkan tidak ada pihak yang menahan distribusi dengan tujuan spekulasi HET akan naik.

Setiap menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk memenuhi sembilan kebutuhan pokok, antara lain minyak goreng (migor). Tujuannya mengantisipasi lonjakan harga akibat tingginya permintaan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengadakan rapat koordinasi minyak goreng dengan para *stakeholders* di Auditorium Kemendag pada 5 Februari 2024.

Rapat yang dihadiri oleh Ketua Kompartemen Regulasi Perdagangan Vincentius Oei Kok Sen ini juga mengevaluasi distribusi DMO minyak goreng rakyat dan koordinasi kesiapan pasokannya di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat ini antara lain:

- 1** Kebijakan DMO tetap dijalankan karena dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan harga minyak goreng domestik.
- 2** HET minyak goreng tetap Rp 14.000/liter sehingga diharapkan tidak ada pihak yang menahan distribusi dengan tujuan spekulasi HET akan naik.
- 3** Pembayaran rafaksi minyak goreng masih dalam proses dan menunggu hasil rapat bersama kementerian/lembaga terkait.
- 4** Kuantitas DMO minyak goreng tetap 300.000 ton/bulan. Diharapkan penyaluran DMO dalam bentuk MinyaKita (MK) mencapai porsi 40%. Apabila MK berkurang dikhawatirkan pasar menduga minyak goreng langka dan memicu keributan meskipun minyak goreng curah atau premium tetap tersedia.
- 5** Penyaluran DMO selama Januari 2024 mencapai 208.000 ton. Industri diimbau tetap menyalurkan DMO sesuai target masing-masing. Apalagi untuk antisipasi Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada Maret dan April 2024. Pemerintah berharap tidak ada gejolak tentang pasokan minyak goreng di pasar.

**Sebelumnya
Ketua Umum
GAPKI Eddy
Martono
mendorong
kebijakan DMO
tidak perlu
dilanjutkan.**



Terkait kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO), sebelumnya Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mendorong kebijakan DMO tidak perlu dilanjutkan.

Sebab produksi CPO jauh lebih besar jika dibandingkan volume konsumsi. Produksi CPO dan PKO tahun 2024 ini diprediksi 53-55 juta ton. Sedangkan konsumsi DMO bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah.

Adapun konsumsi minyak goreng selama ini rata-rata 20 kilogram/kapita/tahun sehingga Indonesia memerlukan sekitar 5.4 juta kilogram minyak goreng sawit setiap tahun. ■



BRIN TAWARKAN ANGGOTA GAPKI TERLIBAT PROYEK SATREPS

Sebagai pilot project di industri sawit, proyek ini sudah dijalankan di PT Agrincin Bengkulu.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengajak GAPKI berpartisipasi dalam proyek *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)* yang dijalankan oleh BRIN bekerjasama dengan Kobe University, Jepang. Proyek ini mengambil tema *Development of Integrated Bio-circular Economy from Food and Energy Estate Waste Fraction to Biofuel and Bio-chemicals* yang dijalankan sejak April 2023 hingga Maret 2028.

Tawaran ini disampaikan oleh perwakilan BRIN yang terdiri dari Prof. Dr. Chiaki Ogino (Kobe University), Prof. Dr. Puspita Lisdiyanti (Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi BRIN), Dr. Ario Betha Juanssilfero dan Nanik Rahmani, Ph.D (Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN) dalam kunjungan ke Kantor GAPKI di Jakarta, 25 Januari 2024. Adapun GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Agro Industri Rapolo Hutabarat dan Ketua Kompartemen. Hubungan Stakeholders Edi Suhardi.

Dalam pemaparan peneliti



BRIN, kerjasama dengan Kobe University merupakan bagian dari kerjasama antara BRIN dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kesepakatan itu dinilai sebagai langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi bio-sirkular terpadu dari fraksi limbah pangan dan energi menjadi biofuel atau bahan bakar hayati dan bio-kimia. Selain melibatkan dua institusi, kerjasama ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam pelaksanaannya, proyek ini berfokus pada implementasi pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk produksi biofuel dan biopolymer. Sebagai *pilot project*

di industri sawit, proyek ini sudah dijalankan di PT Agrincin Bengkulu. BRIN berharap anggota GAPKI yang lain dapat terlibat dan berpartisipasi di dalamnya. Apalagi proyek ini berfokus pada pengembangan ekonomi bio-sirkular dengan pendekatan holistik terhadap limbah pertanian dan energi.

Pemanfaatan fraksi limbah sawit ini bertujuan menghasilkan biofuel dan bio-kimia yang berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh, proyek ini diharapkan tidak sekadar memberikan inovasi dalam pengelolaan limbah, namun juga menciptakan model ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ■

HILIRISASI KOMODITAS SAWIT

“Ada empat hal, satu subsidi untuk pupuk dan bibit, itu akan kita siapkan. Kedua, banyak yang memiliki masalah dengan status tanahnya, jadi kami akan siapkan reforma agraria sehingga memiliki kejelasan soal status tanah. Kita akan siapkan sertifikasi untuk *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang prosesnya akan dibuat lebih mudah, simpel supaya semua bisa mendapatkan dengan lebih mudah.”

ANIES BASWEDAN

Pekanbaru, Riau, 13 Desember 2024



FOTO DAN ILLUSTRASI/ISTIMEWA

PPI DUNIA SIAP PROMOSIKAN SAWIT DI BERBAGAI NEGARA

Bidang yang dikerjasamakan itu dikemas dalam program Pemuda Peduli Sawit Indonesia.

Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) menyatakan siap mengkampanyekan komoditas sawit di berbagai negara. Kesiapan ini disampaikan oleh Koordinator PPI Dunia Hamzah Assuudy Lubis yang didampingi Caroline Kusgianto dan Padel Pane dalam kunjungan ke kantor GAPKI di Jakarta, 9 Februari 2024. Mereka diterima oleh Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI Agam Fatchurrochman yang didampingi oleh anggota Sekretariat GAPKI.

Dalam pertemuan ini dijelaskan bahwa PPI Dunia merupakan aliansi dari 65 PPI dari tiga kawasan di dunia yakni Asia-Oceania, Timur Tengah-Afrika, dan Amerika-Eropa. Anggota PPI Dunia mencapai 85 ribu orang. Mereka merupakan mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di perguruan tinggi berbagai negara di dunia. Selama berada di negeri perantauan, mereka merasakan kurangnya promosi dan kampanye positif komoditas sawit, terutama untuk generasi muda.

Kepada GAPKI, PPI Dunia mengajukan inisiatif kerjasama antara lain pengembangan program pendidikan bersama, riset dan inovasi, jaringan industri dan kesempatan karir, proyek berkelanjutan, forum pengetahuan dan pendidikan publik, penyuluhan dan pelatihan lingkungan, kemitraan global, tanggung jawab sosial bersama, evaluasi dan perencanaan ke depan, serta penguatan citra dan branding.

Bidang yang dikerjasamakan itu dikemas dalam program Pemuda Peduli Sawit Indonesia. Tujuan program ini antara lain menjadi penggerak transformasi positif dalam industri sawit untuk pemuda generasi



mendatang di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, inovasi teknologi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang seimbang, berdaya saing, dan berkeadilan.

Menurut Hamzah, PPI Dunia memiliki pengalaman menjalin kerjasama dengan industri. Salah satunya pernah menjadi penghubung antara *buyer* dan salah satu produk industri dengan salah satu produsen di dalam negeri.

Pengalaman ini paling tidak dapat menjadi pijakan bagi PPI Dunia untuk mempromosikan nilai-nilai berkelanjutan sawit di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Menurut Hamzah, PPI Dunia memiliki pengalaman menjalin kerjasama dengan industri.

Inisiatif PPI Dunia disambut positif Ketua Bidang Kampanye Positif Agam Fatchurrochman. PPI Dunia diharapkan dapat berperan sebagai agen industri sawit untuk generasi muda. Karena itu, inisiatif ini akan diajukan sebagai program kepada BDPKS. GAPKI akan menindaklanjuti inisiatif positif dari PPI Dunia ini. ■

MEMPERKUAT HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERKEBUNAN SAWIT

Loklatih ini bagian dari langkah preventif dan upaya mensosialisasikan serta mengingatkan hak dan kewajiban masing-masing.



Hubungan industrial yang efektif dan lingkungan kerja yang produktif merupakan prasyarat utama perusahaan dapat berkembang. Terlebih untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalin hubungan industrial dengan pekerja. Untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip ketenagakerjaan internasional, GAPKI Kalimantan Barat menggelar Loklatih Dialog Sosial untuk hubungan industrial yang Efektif dan Produktif Pada Sektor Sawit Berkelanjutan di Hotel Mercure Pontianak pada 6-7 Februari 2024.

Loklatih ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang mewakili 20 perusahaan anggota GAPKI Kalbar. Materi loklatih disampaikan oleh Rudi Kuncoro mewakili Direktorat Jenderal PHI Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Ketua Komp. Hubungan Industrial GAPKI Memed Kosasih, Koordinator Dialog Sosial JAPBUSI Sulistri, dan Program Office ILO Lusiani Julia. "Kegiatan ini bagian dari upaya GAPKI mewujudkan industri sawit berkelanjutan," kata Ketua GAPKI Kalimantan Barat Purwati Munawir.

Selain di Kalimantan Barat, loklatih serupa juga diselenggarakan oleh GAPKI Kalimantan Tengah di Hotel BW Palangkaraya pada 20-21 Februari 2024. Kegiatan yang diikuti anggota GAPKI Kalteng ini diapresiasi oleh Kadisnakertrans Provinsi Kalteng Farid Wajdi.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan maupun pekerja," katanya. Selain melibatkan JAPBUSI, loklatih ini juga melibatkan perwakilan ILO.

Melalui pelatihan ini diharapkan industri kelapa sawit semakin kuat

dalam mempromosikan pekerjaan yang layak melalui kerjasama atau konsultasi bipartite. Yang tidak kalah penting, kata Purwati Munawir adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mencegah perselisihan di tempat kerja.

"Kegiatan ini juga bagian dari kolaborasi antara GAPKI dan ILO melalui proyek *Advancing Workers Rights in Indonesia's Palm Oil Sector*.

Kadisnakertrans Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus mengatakan loklatih ini bagian dari langkah preventif dan sosialisasi serta mengingatkan hak dan kewajiban setiap pihak. Dia juga mengingatkan pentingnya jaminan sosial dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mewujudkan hubungan industrial yang solid. ■

SINKRONISASI IMPLEMENTASI PERATURAN FPKM 20 PERSEN

Kementerian ATR merespon positif tuntutan GAPKI dan sepakat bahwa multitafsir peraturan FPKM 20% memang merugikan perusahaan.



Implementasi aturan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FKM) 20% dari luas kebun yang diusahakan masih menjadi masalah serius. Apalagi pemahaman penghitungan 20% antara Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK masih berbeda. Akibatnya terjadi penghitungan ganda (*double counting*) yang pasti merugikan dunia usaha.

Berangkat dari kondisi ini, GAPKI menemui Kementerian ATR/BPN sebanyak dua kali selama Januari 2024. Yang pertama oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Wakil Ketua Umum II Susanto pada 10 Januari 2024.

Pertemuan kedua pada 19 Januari 2024 oleh Ketum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI Safwani. Tujuannya sinkronisasi Permen ATR/BPN dan Permentan terkait FPKM sebesar 20%.

Pada pertemuan pertama GAPKI menyampaikan bahwa perusahaan

yang sudah memiliki plasma lebih dari 20% masih dituntut lagi 20% dari lahan ex pelepasan. Selain itu, pada saat perpanjangan HGU masih ada tuntutan terkait plasma 20% karena perpanjangan ditafsirkan sama dengan pemberian HGU baru. Penghitungan ganda ini muncul karena pemahaman penghitungan 20% antara Kemen ATR, KLHK, dan Kementan tidak sama. GAPKI menuntut dilibatkan dalam penyusunan perubahan PP dan Permen ATR.

Kementerian ATR merespon positif tuntutan GAPKI dan sepakat bahwa multitafsir peraturan FPKM 20% memang merugikan perusahaan. Untuk itu, ATR/BPN sepakat bahwa proses HGU harus mengacu pada kebijakan Kementerian Pertanian.

Kementerian ATR/BPN berencana meninjau ulang Permen ATR terkait FPKM 20% agar sinkron dengan ketentuan di Kementan. Kemen ATR/BPN segera menyusun petunjuk teknis proses HGU dengan mengadopsi Surat

Edaran Dirjen Perkebunan tentang Fase 1-3 terkait FPKM agar tidak ada multi-interpretasi.

Kementerian ATR/BPN segera menyarankan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten selaku anggota Panitia B untuk mencantumkan persyaratan HGU baru atau perpanjangan secara jelas dalam Risalah Panitia-B sesuai dengan ketentuan FPKM dari Kementan.

Pencantuman syarat ini sebagai rujukan Kementerian ATR/BPN dalam proses HGU. Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa kewajiban plasma hanya sekali saat permohonan HGU. Kewajiban FPKM tidak berlaku untuk perpanjangan atau pembaharuan HGU. Selain itu, perusahaan juga disarankan membuat legal dokumen seperti akta notaris ketika melakukan pemenuhan FPKM seperti penyerahan lahan kepada koperasi sebagai bentuk pemenuhan FPKM. Dokumen ini bisa menjadi bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi persyaratan yang menjadi kewajibannya. ♦



OPTIMALISASI LAHAN KEBUN SAWIT UNTUK PADI GOGO

Kebijakan ini untuk mendorong program ketahanan pangan di tengah terbatasnya lahan pertanian padi.

Pemerintah berencana mengintegrasikan kelapa sawit dan padi gogo melalui upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi nasional. Kebijakan ini untuk mendorong program ketahanan pangan di tengah terbatasnya lahan pertanian padi. Optimalisasi lahan kebun sawit milik perusahaan dan pekebun sawit ini disampaikan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Gedung C Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dalam pertemuan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat dan Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR Muhammad Iqbal. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebun sawit untuk Program Kesatria (Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan) ini. Tahun ini, Kementan menargetkan 800 ribu - 1 juta hektar lahan untuk program Kesatria. Dari perusahaan

besar swasta dan BUMN diharapkan tersedia 235 ribu hektar dan dari perkebunan sawit rakyat tersedia 765 ribu hektar.

Dalam rapat ini, GAPKI menjelaskan potensi lahan dari PSR Jalur Dinas dan Kemitraan tahun 2022 dan

Benih hibah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan sekitar 100 kilogram.

2023 yang mencapai 3.500 hektar. GAPKI juga menjelaskan perusahaan maupun koperasi mitra belum punya pengetahuan dan kemampuan dalam budidaya padi gogo di lahan sawit. Tumpang sari bisa juga dilakukan melalui program CSR perusahaan.

Untuk mendapat bantuan benih dan Saprodi program ini perlu mengajukan CP/CL lebih dulu melalui Kadis Tanaman Pangan Kabupaten dan terdaftar dalam Simluhtan. Benih hibah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan sekitar 100 kilogram. Kebutuhan benih padi gogo per hektar sebanyak 20 kilogram. Untuk tahun 2024, ketersediaan benih tidak cukup untuk target tahun ini. GAPKI dan perusahaan diharapkan dapat memberikan bantuan Saprodi.

Kementan akan mengundang GAPKI, PT Perkebunan Nusantara, asosiasi pekebun sawit untuk membahas target 1 juta hektar padi gogo. Program ini rencananya akan diresmikan dengan percontohan penanaman padi gogo di kebun sawit seluas 3-5 hektar. ■



ENERGI HIJAU TERBARUKAN

“Kita mungkin nanti salah satu dari sedikit negara yang BBM-nya bisa 100% *green* dan *renewable*. Dari mana? Solar? Bisa 100% dari kelapa sawit. Sekarang dengan solar, B35 saja kita sudah menghemat kurang lebih USD 10 miliar tiap tahun, tidak perlu kita kirim ke luar negeri. Kita sudah mampu bikin B35 dan kita sudah mampu bikin B100, biosolar 100% dari kelapa sawit.”

PRABOWO SUBIANTO

Ritz Carlton Jakarta, 29 Januari 2024

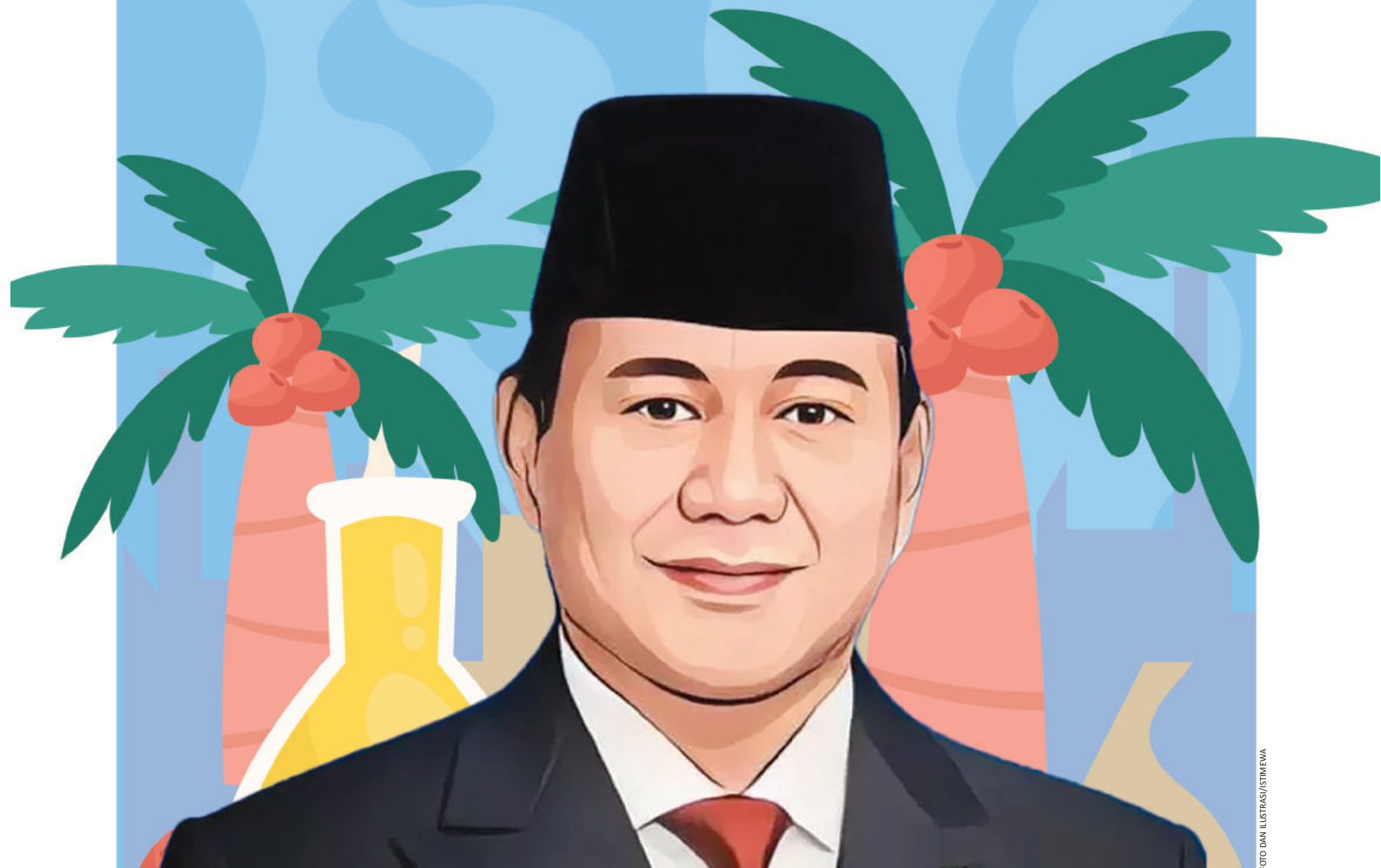


FOTO DAN ILLUSTRASI/ISTIMEWA

KONVERSI GAS METANA LIMBAH SAWIT JADI ENERGI TERBARUKAN

Ada potensi besar di balik limbah sawit yang memiliki nilai ekonomis.

Sebagai salah satu karunia terbesar Tuhan untuk Indonesia adalah tanaman kelapa sawit yang semua komponennya dapat dimanfaatkan. Tidak hanya buah sawit untuk kebutuhan pangan dan energi, limbah sawit pun menghasilkan beragam produk bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Bahkan, gas metana yang dihasilkan dari pembusukan biomassa limbah sawit dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan.

Pemanfaatan gas metana sebagai energi terbarukan dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng dalam *Seminar Nasional Percepatan Peningkatan Pemanfaatan Gas Metana Di Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Sumber Listrik, Bio-CNG dan Hidrogen* yang diselenggarakan oleh GAPKI di Ashley Hotel Jakarta pada 31 Januari 2024. Seminar ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang Agro Industri GAPKI Rapolo Hutabarat.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan industri sawit. Ada potensi besar di balik limbah sawit yang memiliki nilai ekonomis. Informasi yang lengkap diharapkan membuka ruang investasi dan layanan asuransi guna mengkapitalisasi pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai sumber energi terbarukan.

Tanaman kelapa sawit menghasilkan biomassa antara lain pelepah, tandan kosong, fiber, cangkang. Dalam proses produksi CPO sebagian biomassa terbawa dalam limbah cair dan harus dibusukan agar limbah cair memenuhi syarat *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) untuk dapat dilepaskan ke badan air atau dimanfaatkan sebagai pupuk. Proses pembusukan ini menghasilkan



gas metana, salah satu penyumbang terbesar *global warming* dengan potensi 27,9 kali dari emisi Co₂.

Dengan teknologi *Methane Capture*, gas metana dapat diubah menjadi energi yang dapat memangkas biaya produksi minyak sawit serta dapat mentransformasi menjadi energi untuk menggantikan bahan bakar ke tungku boiler. Bisa juga diproses sebagai bahan bakar gas engine penggerak genset sampai pengganti LPG. Optimalisasi limbah sawit ini diharapkan mendukung program pemerintah yang

mencanangkan *Net Zero Emission* tahun 2060.

Sebagai asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit, GAPKI berharap pemanfaatan energi terbarukan dari PKS ini membantu mempercepat bauran energi nasional yang bersumber dari energi baru terbarukan. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan komoditas sawit lainnya juga dapat menyusun data akurat tentang PKS yang memiliki fasilitas *methane capture*, Bio-CNG dan hidrogen ataupun yang belum memiliki fasilitas tersebut. ■

GAPKI RIAU SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR

“Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada GAPKI,” katanya.

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami musibah, GAPKI Cabang Riau menyalurkan bantuan sebanyak 4,5 ton beras dan 900 paket sembako untuk korban banjir di Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kuansing Provinsi Riau. Setiap kabupaten mendapatkan alokasi bantuan 1,5 ton beras dan 300 paket sembako. Paket sembako terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak goreng, 10 bungkus mie instan, 1 kaleng ikan sarden, dan 1 pax teh celup.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban saudara kami yang sedang tertimpa musibah,” kata Ketua GAPKI Cabang Riau, Lichwan Hartono ketika menyerahkan bantuan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Kampar pada 22 Januari 2024. Banjir melanda tiga kabupaten ini secara bergantian dalam waktu berdekatan akibat curah hujan yang tinggi.

Banjir terjadi sejak akhir 2023 yang berlanjut hingga memasuki 2024. Ribuan rumah di tiga kabupaten terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata 40-60 sentimeter. Beberapa sungai besar di tiga kabupaten ini meluap yang menyebabkan banjir di berbagai tempat.

Distribusi bantuan diserahkan melalui Kepala Dinas Sosial setempat oleh Pengurus GAPKI Cabang Riau secara langsung.

Untuk bantuan ke Palalawan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Edwin Romel dan Kepada Dinas Perizinan Budi Sularni. Untuk bantuan di Kabupaten Kampar diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten Kampar Zamzami Hasan oleh Ketua GAPKI Cabang Riau Lichwan Hartono.



Khusus untuk bantuan ke korban banjir di Kuansing dilakukan oleh Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Riau Marino, Bandahara Heri Amin dan Ketua Kompartemen Hubungan Antar Lembaga Gunadi.

Bantuan diterima oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuansing Andrilzul.

Kepala Dinas Sosial kabupaten Kampar Zamzami Hasan

menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GAPKI Cabang Riau yang menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana ala mini.

“Insya Allah semua bantuan distribusikan langsung kepada masyarakat,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Andrizul juga menyatakan hal serupa. “Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada GAPKI,” katanya. ■



Kolaborasi GAPKI dan DAD BERDAYAKAN MASYARAKAT DAYAK

Hal ini untuk mencegah dan menyelesaikan masalah antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS).

Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar kebun menjadi salah satu faktor penting keberlangsungan kebun kelapa sawit. Karena itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat adat perlu memiliki pemahaman yang sama sehingga komunikasi dan kerjasama dapat terjalin dengan erat. Untuk tujuan mulia itulah GAPKI dan Masyarakat Adat Dayak (DAD) berkomitmen menjalin kolaborasi untuk kebaikan bersama.

Pertemuan antara GAPKI dan DAD Kalimantan Tengah berlangsung di Palangkarya pada 24 Januari 2024. "Kami bersama saling mendukung dalam memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat sesuai dengan aturan hukum adat Dayak Kalteng," kata H. Agustuar Sabran, Ketua Umum DAD Kalimantan Tengah. Hal ini untuk mencegah dan menyelesaikan masalah antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS).

Menurut kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini, kondisi sosial yang kondusif tentu sangat penting bagi perusahaan. Karena itu, masing-masing pihak diharapkan mampu menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa masalah yang didiskusikan dalam pertemuan GAPKI dan DAD antara lain realisasi plasma 20 persen,

perekrutan tenaga kerja lokal, dan penyaluran CSR yang sesuai peraturan.

"Ke depan kami ingin masalah sosial di dunia investasi dapat ditangani dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud," katanya. Karena itu, masing-masing pihak disadarkan tentang kewajibannya sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Dari pertemuan GAPKI dan DAD Kalimantan Tengah ini, ada beberapa poin yang disepakati antara lain:

- 1 Pemberdayaan dan sinergi masyarakat adat Dayak dalam menyelesaikan masalah dengan PBS yang terkait ketentuan adat.
- 2 Saling mendukung dan memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat sesuai dengan hukum adat Dayak di Kalteng.
- 3 Mendorong PBS merealisasikan kewajiban untuk mewujudkan pengamanan sosial dari masyarakat adat dan sekitar kebun.
- 4 Bersama ormas-ormas di Kalteng menjaga kondusifitas investasi di Kalteng sesuai hukum negara dan hukum adat Dayak di Kalteng.
- 5 Realisasi plasma 20 persen, rekrutmen tenaga lokal dan penyaluran CSR sesuai ketentuan yang berlaku.





SOSIALISASI HILIRISASI SAWIT UNTUK JURNALIS

Kontribusi sawit semakin signifikan dengan peningkatan produk hilir sawit.

Hilirisasi menjadi salah satu fokus program pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya sumber daya dari perkebunan kelapa sawit. Penguatan produk hilir diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, hilirisasi disosialisasikan secara sistematis melalui *Workshop Jurnal Industri Hilir Sawit* untuk media dengan harapan pemahaman terhadap tema ini semakin solid dan menjadi isu bersama.

Workshop yang diikuti oleh puluhan jurnalis ini diselenggarakan di The Papandayan Hotel, Bandung pada 1 Februari 2024. Materi disampaikan oleh beberapa kalangan antara lain DMSI, GAPKI, BPD PKS, APOLIN, Kementerian Perindustrian, dan akademisi ITB. Peserta juga mengunjungi Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB untuk mengetahui peran katalis dalam konversi minyak sawit menjadi biodiesel, biofuel, dan bioavtur.

Dalam *workshop* ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Komp. Media Relations Fenny Sofyan yang membahas kondisi industri sawit nasional mutakhir. Dalam pemaparannya Fenny berfokus pada perkembangan komoditas sawit terbaru, tantangan dan peluang sawit di masa depan. "Sawit tetap memberikan harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya. Kontribusi sawit semakin signifikan dengan peningkatan produk hilir sawit.

Sementara itu, Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga nilai bisnis hilirisasi sawit dengan teknologi yang tersedia sekarang mencapai USD 62,9 miliar. Angka ini berasal dari hasil ekspor USD 38,4 miliar, domestik USD 21,4 miliar dan biomassa USD 3,1 miliar. Pada 2007, jenis produk hilir sawit hanya 57 jenis. Di tahun 2023 meningkat menjadi 179 jenis. "Kesempatan masih terbuka luas untuk dikembangkan agar meningkatkan *revenue* sawit kita," katanya.

Meski produk hilir sawit Indonesia sudah tinggi, namun jumlahnya masih di bawah Malaysia yang memiliki 260



produk turunan sawit. Padahal, luas lahan sawit Malaysia hanya 5 juta hektar lahan, jauh di bawah Indonesia yang 16,8 juta hektare. Untuk mengejar pencapaian ini, Indonesia membutuhkan badan khusus untuk mengoptimalkan sawit dan terhindari dari tumpang tindih regulasi. "Jangan banyak kementerian *cawe-cawe* urusan sawit," katanya.

Ketua Panitia *Workshop*, Qayuum Amri berharap *workshop* ini memberikan pemahaman yang mendalam sehingga hilirisasi sawit menjadi perhatian semua kalangan yang berkaitan dengan komoditas sawit. ■

BADAN SAWIT NASIONAL

“Rasanya kita mesti punya Badan Sawit Nasional yang kerjanya langsung di bawah presiden. Sebab ini komoditas besar dan kita juara dunia soal ini. Badan Sawit Nasional bisa bekerja untuk itu agar petani sawit kita harkat dan martabatnya lebih baik. Mereka akan mendapat tempat terhormat karena mendapat harga baik.”

GANJAR PRANOWO

Kubu Raya, Kalimantan Barat, 31 Januari 2024



FOTO DAN ILLUSTRASI/ISTIMEWA



KOMITMEN GAPKI DUKUNG KEMAJUAN PERS INDONESIA

PWI punya peranan penting untuk menjelaskannya ke masyarakat dari 3 manfaat dimensi keberlanjutan sawit.



Pers memiliki peran penting dalam penyebaran informasi tentang komoditas sawit kepada masyarakat luas, termasuk kepada dunia. Selain menjadi sarana untuk kampanye positif, pers juga berperan penting dalam meluruskan misinformasi tentang industri sawit. Karena itu, kemajuan pers Indonesia sangat penting sehingga GAPKI terus memperkuat kerjasama untuk peningkatan kompetensi jurnalis, terutama jurnalis muda.

Komitmen GAPKI meningkatkan kompetensi jurnalis diwujudkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta pada 20 Februari 2024. Penandatanganan

kerjasama pelatihan jurnalistik ini disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri.

Pelatihan jurnalistik untuk jurnalis muda yang digagas GAPKI dan PWI Pusat ini rencananya diselenggarakan di lima kota yakni Jambi, Kendari, Tarakan, Sorong, dan Aceh. Langkah ini adalah upaya konkret memberikan pemahaman yang utuh kepada jurnalis muda di berbagai daerah tentang komoditas sawit. Dengan pemahaman ini, pers dapat memberikan informasi yang akurat tentang sawit kepada masyarakat.

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, industri ini sering menjadi sorotan isu negatif. Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan berbagai persepsi yang tidak akurat terhadap industri sawit," kata Eddy Martono. Karena itu, melalui pemahaman yang baik

dan liputan yang berimbang sesuai fakta, wartawan dapat membantu membentuk persepsi yang benar dan mengedukasi publik tentang pentingnya keberlanjutan industri sawit nasional.

Menurut Eddy Martono, PWI punya peranan penting untuk menjelaskannya ke masyarakat dari 3 manfaat dimensi keberlanjutan sawit, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. GAPKI punya komitmen berkontribusi memajukan pers Indonesia melalui publikasi di media massa untuk membangkitkan optimisme dan potensi yang dimiliki industri sawit sebagai komoditas strategis Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan kebebasan pers merupakan pilar penting berdemokrasi. "Pers harus menjadi sumber informasi yang jelas dan akurat, bukan hanya asumsi atau spekulasi," katanya. ■

GAPKI ADAKAN STUDI BANDING KE PT KAYUNG AGRO LESTARI

PT KAL meraih predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup selama dua tahun berturut-turut.

Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, GAPKI dan 19 perusahaan anggotanya mengadakan studi banding ke PT Kayung Agro Lestari (ANJ Group) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kunjungan pada 20 Februari 2024 ini untuk melihat langsung praktik terbaik PT KAL, termasuk dalam membangun kerjasama dengan masyarakat di daerah rawan kebakaran dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan.

Studi banding ini diikuti oleh Ketua Bidang Sustainability GAPKI Bambang Dwi Laksono, 19 anggota GAPKI dan Sekretariat GAPKI serta GAPKI Cabang Kalimantan Barat. PT KAL dipilih karena pencapaian yang diraih selama ini antara lain meraih predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup selama dua tahun berturut-turut.

Melalui dua anak usahanya, ANJ Group juga meraih Proper Emas, sebuah prestasi yang layak dijadikan contoh. PT KAL juga telah mendapatkan sertifikat ISPO dan RSPO.

Salah satu hal menarik yang dipelajari dari PT KAL adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Tolak dan Kuala Satong melalui program *Integrated Fire Management System*. Dua desa ini rawan kebakaran karena 50% daerahnya adalah lahan gambut.

Program ini dipilih karena masyarakat di dua desa ini punya kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun ada Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), fungsinya belum optimal. Banyak area yang terlantar.

PT KAL mengenalkan program ini melalui dukungan sarana dan prasarana, pelatihan kapasitas anggota KTPA, sertifikasi oleh Manggala Agni, apel siaga patroli gabungan dan



pemanfaatan lahan terlantar melalui budidaya nanas dan jeruk oleh KTPA. Perusahaan juga memberikan insentif Rp 500 juta per tahun apabila dalam satu tahun tidak terjadi kebakaran dan tidak ada titik api (*hotspot*) di Desa Kuala Satong dan Kuala Tolak.

Program kerjasama ini membuat

masyarakat lebih mandiri dalam menekan potensi kebakaran. PT KAL dinilai berhasil mendorong masyarakat di sekitar kebun berperan aktif dalam mengawal dan menjaga lahan. Praktik-praktik terbaik ini diharapkan dapat diterapkan oleh perusahaan anggota GAPKI lainnya. ■

LITERASI SAWIT BERKELANJUTAN UNTUK GENERASI MILENIAL



“SOSWIT Goes to School ini sangat tepat untuk edukasi dan literasi tentang sawit kepada generasi Z.”

Mengenalkan kelapa sawit kepada generasi milenial adalah faktor penting menjaga keberlangsungan sawit di masa depan. Dengan memahami sawit secara komprehensif, mereka diharapkan punya cara pandang positif dan produktif terhadap komoditas andalan ekspor Indonesia ini.

Karena itu, GAPKI bekerjasama dengan PT GSIP AMR mengadakan *Sobat Sawit (SOSWIT) Goes to School* di SMAN 1 Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 26 Februari 2024. Sekolah ini berada di wilayah ring-1 PT GSIP AMR.

Edukasi dan literasi sawit berkelanjutan ini diikuti oleh 100 orang siswa dan guru SMAN 1 Pangkalan Lada, Camat Pangkalan Lada, pejabat Dinas Pendidikan hingga Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat, pengurus GAPKI Cabang Kalteng, Administratur dan Peneliti PT GSIP AMR serta Administratur PT GSDI GSYM. Materi edukasi dan literasi yang diberikan kepada siswa dikemas sesuai dengan kearifan lokal agar dekat dengan kehidupan mereka.



Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Muhammad Alamsyah menyambut positif kolaborasi institusi pendidikan dan perusahaan swasta. *“SOSWIT Goes to School ini sangat tepat untuk edukasi dan literasi tentang sawit kepada generasi Z,”* katanya.

Apresiasi juga diberikan kepada GAPKI dan Astra Agro Lestari Group atas sinergi yang terjalin. PT GSIP AMR adalah salah satu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, Tbk.

Dalam kegiatan ini, salah satu materi menarik yang disampaikan adalah bagaimana sawit menjadi komoditas ramah lingkungan. Materi ini disampaikan oleh Shifa Syafira Rachmat dan Arif Hidayat. Dua

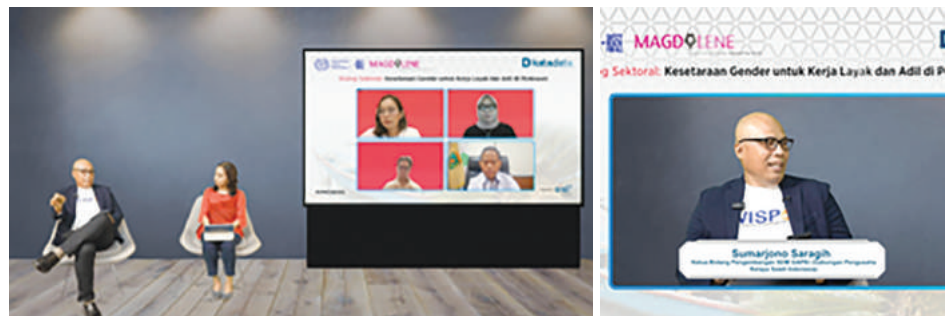
pemateri ini peneliti ahli mikrobiologi dari Reseach & Development PT GSIP AMR. Salah satu materinya adalah tentang tiga mekanisme yang dimiliki kebun sawit yang bersinergi melindungi tanah dan air. Tiga mekanisme itu adalah struktur dan naungan kanopi, tata kelola lahan kebun sawit, dan sistem perakaran kelapa sawit.

Bagi generasi muda, materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka ini tentunya sangat menarik. Apalagi dikemas berbasis kearifan lokal. Pada kegiatan ini juga PT GSIP AMR menyerahkan bantuan prasarana antara lain 5 buah kipas angin turbo 18 dan 5 buah APAR (Alat Pemadam Api Ringan) serta 300 bibit tanaman (endemik dan buah). ■



KOMITMEN INDUSTRI SAWIT PADA KESETARAAN GENDER

GAPKI telah menyusun Panduan Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit.



Isu tentang pekerja perempuan selalu menarik perhatian karena dihubungkan dengan perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Tema ini semakin banyak dibahas, terutama menjelang perayaan *International Women's Day* pada 8 Maret setiap tahun. Pada tahun 2024 ini, ILO (International Labour Organization) bersama Katadata dan Magdalena mengadakan seminar virtual dengan tema Kesetaraan Gender untuk Kerja Layak dan Adil di Pedesaan pada 27 Februari 2024.

Dalam virtual event ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM Sumarjono Saragih sebagai pembicara bersama Direktur Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Yuli Adiratna, Ketua AP2HI Janti Djuari, Staf Program Nasional ILO Jakarta Lusiani Julia, dan Sekretaris Jenderal KAMIPARHO

Sulistri. Bertempat di kantor Katadata di Jakarta, pemaparan GAPKI berfokus pada perempuan pekerja di industri sawit dan kesempatan berkarya bagi pekerja perempuan di industri sawit.

Dalam seminar ini, ILO menjelaskan tentang pekerja di sektor rural Indo-Pasifik dengan fokus pada perempuan. Bersama pemerintah, ILO dan organisasi pengusaha dan pekerja mendorong kepatuhan pada standar Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kesetaraan gender. Di Indonesia, proyek ini sudah dijalankan di sektor sawit dan pengolahan ikan di mana perempuan berperan penting dalam rantai pasok industri ini.

Bagi ILO, seminar memajukan kesetaraan gender di sektor pedesaan merupakan bentuk penghargaan kepada mereka yang berkontribusi pada kesetaraan gender di lingkungan kerja, terutama di wilayah pedesaan.

Sedangkan Sumarjono Saragih menegaskan perkebunan sawit berkomitmen melindungi perempuan pekerja. GAPKI telah menyusun *Panduan Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit*. Panduan ini dirancang selaras dengan gerakan sawit berkelanjutan yang mengutamakan hak pekerja perempuan di perkebunan sawit.

Menurut Sumarjono Saragih, industri kelapa sawit tidak mungkin menutup kesempatan bagi pekerja perempuan. Mereka punya hak yang sama dengan pekerja laki-laki dalam hal hak dan kewajiban sebagai pekerja. "Masalah pekerja perempuan ini secara umum menyangkut 16 juta pekerja di sektor perkebunan sawit," katanya. Karena itu, industri sawit akan terus berkomitmen terhadap kesetaraan gender pekerja perempuan. ■

USULAN GAPKI UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL SAWIT BERKELANJUTAN

RAN KSB sebagai orkestrasi kebijakan sawit nasional di berbagai sektor Kementerian/Lembaga.

GAPKI memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah mengenai urgensi keberlanjutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024.

Masukan GAPKI disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet secara virtual pada 21 Februari 2024. Dalam FGD ini, GAPKI diwakili oleh Kompartemen ISPO Ismu Zulfikar.

Untuk memastikan keberlanjutan RAN KSB 2019-2024, pemerintah menjaring masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tim Ahli Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP KSB) Sumatera Utara dan GAPKI dari kalangan industri sawit.

Salah satu hasil penting FGD adalah posisi RAN KSB sebagai orkestrasi kebijakan sawit nasional di berbagai sektor Kementerian/Lembaga. Implementasi program akan melibatkan banyak pihak di luar pemerintahan.

Karena itu, kementerian/ lembaga diminta memberikan masukan terkait RAN KSB dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029) yang akan menjadi acuan merumuskan pembangunan tahunan pemerintah. ■



Beberapa masukan GAPKI kepada pemerintah dalam FGD ini antara lain:

- Perpanjangan Inpres No. 6 Tahun 2019 karena jadi instrumen konkret pemerintah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan sawit untuk energi terbarukan, meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar, dan mempercepat realisasi KSB.
- Percepatan implementasi RAN KSB sebagai panduan bagi berbagai K/L dan swasta nasional dan daerah dalam kebijakan, perencanaan dan implementasi Kebijakan pengembangan KSB secara nasional dan terintegrasi.
- Percepatan penyelesaian tumpang tindih peraturan dan legalitas lahan yang belum terpecahkan karena tata ruang atau karena masalah kawasan hutan.
- Perluasan cakupan RAN KSB untuk antisipasi isu-isu internasional pengembangan sawit seperti kebijakan EUDR, dan lain-lain.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan implementasi RAN dan dukungan sarana.
- Peran dan keterlibatan GAPKI dan asosiasi lain dirumuskan dalam payung hukum.





GAPKI LAKUKAN MEDIA VISIT KE TEMPO

“Pemberitaan media bisa mendorong pembentukan kebijakan sawit yang memajukan industri dan berkelanjutan.”



Kunjungan media (*media visit*) merupakan salah satu metode menjalin hubungan yang baik antara organisasi dengan media massa.

Hubungan yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kedua pihak. Berangkat dari niat ini, GAPKI mengadakan kunjungan media ke TEMPO di Jakarta, 23 Februari 2024. Media visit ini dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa, dan Kompartemen Media Relations Fenny Sofyan. Kunjungan ke TEMPO ini merupakan yang pertama bagi GAPKI.

Dalam diskusi bersama Direktur Utama Tempo.co Wahyu Dhyatmika dan Direktur Tempo

Meiky Sofyansyah, Ketum GAPKI Eddy Martono memaparkan informasi

terbaru tentang kondisi industri sawit nasional, termasuk kebun sawit menjadi sumber mata pencaharian sekitar 16 juta pekerja di sektor sawit. “Di sisi lainnya, industri sawit sangat bergantung pada petani sawit,” katanya.

Kontribusi komoditas sawit terhadap perekonomian nasional sangat signifikan yang ditandai dengan sumbangan devisa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia sekaligus sebagai konsumen terbesar. Dengan kondisi kebutuhan minyak sawit dalam negeri yang meningkat untuk kebutuhan pangan, oleokimia hingga biodiesel, industri sawit dituntut sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dengan kontribusi signifikan kepada

negara, GAPKI berharap TEMPO dapat memberitakan pentingnya peran sawit bagi perekonomian nasional. “Pemberitaan media bisa mendorong pembentukan kebijakan sawit yang memajukan industri dan berkelanjutan,” kata Fenny Sofyan, Kompartemen Media Relations GAPKI. Karena itu, relasi dengan media harus terus dirawat dan dijaga bersama.

Fenny Sofyan mengatakan hubungan industri dan media yang baik adalah faktor penting memberikan pencerahan kepada publik tentang peranan sawit dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang positif dan berimbang membuat media dan kalangan industri dalam bersinergi untuk kemajuan bangsa dan negara. ■

MENSYUKURI SEBUAH PERJALANAN

Usia GAPKI genap 43 tahun pada 27 Februari 2024. Sebuah perjalanan panjang yang patut kita syukuri bersama. Regenerasi, kaderisasi, dinamika organisasi, dan catatan tinta emas adalah cermin perjalanan panjang GAPKI berkontribusi untuk Indonesia melalui komoditas kelapa sawit. Selamat Ulang Tahun GAPKI ke-43, semoga terus menebar manfaat untuk Indonesia.

